

Media Massa Sebagai *Second Track* Diplomasi Dalam Mendukung Kepentingan Nasional Indonesia di Laut China Selatan

Eri Budi Wibowo

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Program Studi Operasi Laut
Email: eri.bwibowo@gmail.com

Submitted: 4 April 2022 **Revised:** 12 Februari 2022 **Accepted:** 16 April 2022

ABSTRAK

Perluasan aktor non-negara dalam hubungan internasional menjadikan media massa diakui sebagai salah satu instrumen diplomasi yang cukup berpengaruh terhadap kebijakan maupun proses *decision making*. Berdasarkan perkembangan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemeneritan Indonesia menggunakan instrumen media massa sebagai *second track* diplomasi guna mendukung kepentingan nasional Indonesia di Laut China Selatan (LCS). Teori yang digunakan adalah teor komunikasi massa menurut McQuail dan teori *second track* diplomasi menurut Louise Diamond dan John Mc Donald. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan objek penelitian adalah kebijakan *second track* diplomasi Indonesia melalui peran media massa. Sumber penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder meliputi referensi dan buku, jurnal, artikel, website, dan portal pemberitaan sebagai pendukung penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan eksposur pemberitaan terhadap pengelolaan potensi maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di LCS menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk eksistensi pemerintah Indonesia terhadap hak berdaulat di LCS. Kemudian, dibutuhkan *agenda setting* media massa yang menyoroti dukungan masyarakat internasional mengenai implementasi *freedom of navigation* di LCS.

Kata Kunci: *Media Massa, Kepentingan Nasional, Second Track Diplomasi, dan Laut Cina Selatan*

ABSTRACT

The new paradigm of non-state actors in international relations has made the mass media recognized as one of the instruments of diplomacy that is quite influential on state policy and decision-making processes. Based on these developments, the purpose of this study is to analyze how the Indonesian government uses mass media instruments as a second track of diplomacy to support Indonesia's national interests in the South China Sea. The theory used is the theory of mass communication according to McQuail and the theory of second track diplomacy according to Louise Diamond and John Mc Donald. The research method used is qualitative, with the object of research is Indonesia second track diplomacy policy through the role of the mass media. The sources of this research were obtained from secondary data base on references and books, journals, articles, websites, and news portals that supporting reserach analysis. The results of this study indicate that increasing news exposure to the management of the maritime potential of the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) in the South China Sea is important as a form of the Indonesian government's existence for sovereign rights in the South China Sea. Second is, the strategy of mass media setting agenda is needed that highlights international community support regarding the implementation of freedom of navigation in South China Sea.

Keywords: *Mass Media, Second Track Diplomacy, National Interest, South China Sea*

PENDAHULUAN

Dinamika konflik Laut China Selatan (LCS) pada perkembangannya telah memaksa keterlibatan Indonesia ketika China secara terbuka mengakui klaim wilayah yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terletak di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Di era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi), kepentingan nasional di LCS bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan kawasan dan mengedepankan upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik (Rakhmat, 2022). Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk pertamakalinya pada tahun 2017 merilis peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memberikan penamaan baru terhadap penamaan Laut Natuna Utara untuk menggantikan nama LCS. Sebagai bentuk diplomasi Indonesia, penamaan Laut Natuna Utara menghindari tensi konflik yang kian memanas, sekaligus mencegah kebingungan diantara negara-negara yang berkepentingan atas klaim kedaulatan di LCS (Andika & Aisyah, 2017). China dalam beberapa kesempatan seolah tidak menanggapi upaya diplomasi Indonesia yang secara formal menolak pendudukan China di LCS. Diplomasi melalui jalur “*government to government*” oleh pemerintah Indonesia tidak serta merta membuat China mematuhi hukum laut internasional UNCLOS 1982 (Rizky, 2017).

Indonesia kemudian berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam di ZEE sekaligus mendapatkan keuntungan strategis ketika ZEE di wilayah perairan Natuna Utara dikelola sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional (Sulistiyani, Pertiwi, & Sari, 2021). Namun kuatnya pengaruh China khususnya di wilayah LCS, membuat Indonesia harus mengkaji ulang mengenai aspek diplomasi yang selama ini dianggap tidak dapat berbuat banyak untuk menekan China mencabut klaim kedaulatan atas wilayah LCS, dan mematuhi hukum laut Internasional UNCLOS 1982 (Andika & Aisyah, 2017). Menurut Henrik Thune dalam disertasinya berjudul *Beyond the CNN effect: Towards a Constitutive Understanding of Media Power in International Politics*, dikutip dari (Setiawan, 2019), bahwa pengaruh media masa dalam proses *decision making* dewasa ini tentunya dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan sebagai instrumen guna mengkomunikasikan tatanan struktur politik yang memuat pesan dan simbol terhadap kekuatan hegemoni. Hal tersebut menggambarkan sebuah kerangka pandangan terhadap media massa sebagai perpanjangan tangan negara dalam kebijakan politik luar negeri (Coban, 2016).

Dov Shinar dalam (Andrianti, 2015) melihat bahwa fenomena tersebut menggambarkan pentingnya peran media massa dalam mengurai kebuntuan terhadap pandangan umum terkait penyelesaian konflik internasional yang memuat banyak persinggungan mengenai kepentingan dan tujuan nasional dari sejumlah negara yang

terlibat di dalamnya. Khususnya di Indonesia, media massa telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tercatat dari hasil pantauan Dewan Pers Indonesia di tahun 2018-2020 terdapat 47.000 media massa yang beroperasi, dari jumlah tersebut media massa online yang aktif dalam melaksanakan kegiatan pemberitaan mencapai 43.300, sekitar 3000 lebih diantaranya terdiri dari media massa cetak, TV, dan Siaran Radio (Setiawan, 2020). Pesatnya era industri media massa, menjadikan instrumen penyampaian komunikasi dan informasi secara massal ini mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan sifatnya yang menyeluruh hingga menembus berbagai lapisan dan kelompok masyarakat yang heterogen tanpa memandang batasan-batasan geografis maupun sosial tertentu (Santosa, 2017).

Menurut Canan Naveh dikutip dari (Sholihat, 2019), pada konteks yang lebih luas, media massa melalui pembentukan *framing* dan *agenda setting* telah menunjukkan peran yang nyata sebagai instrumen atau perpanjangan tangan oleh negara maupun kelompok kepentingan tertentu. *Framing* dibutuhkan untuk menonjolkan perspektif atau cara pandang media massa dalam menilai sebuah fenomena tertentu. *Framing* media massa menghantarkan pembaca, pendengar, maupun pemirsa dalam menginterpretasikan arti dari apa yang mereka saksikan sesuai dengan perspektif yang dibangun oleh media massa. Dalam membangun sebuah *framing* tertentu media massa tidak secara utuh atau

hanya menonjolkan satu atau dua sisi bagian dari realita untuk dijadikan sebagai pandangan umum yang disampaikan melalui pemberitaan. Dengan demikian framing sama halnya dengan upaya media massa tersebut dalam memilah ataupun menyeleksi apa saja yang ditampilkan kepada publik maupun yang tidak (Ritonga, Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi, 2018). Pada tahap selanjutnya, *framing* mengarah pada sebuah perencanaan yang dikenal dengan *agenda setting*. Bernard C. Cohen dalam mengartikan *agenda setting* diartikan sebagai pengaturan atau penyusunan oleh media massa terhadap agenda/acara/kegiatan yang menggambarkan kekuatan media massa dalam mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki sebuah berita dari news agenda mereka kepada publik. Melalui cara ini, media massa berupaya membuat apa yang penting oleh aktor berkepentingan dalam media massa juga menjadi hal penting bagi khalayak publik (Ritonga, 2018).

Hadirnya perusahaan-perusahaan media global yang meluas dengan kantor perwakilan yang tersebut di mancanegara. Hal tersebut telah mengakibatkan perluasan peran media massa secara terus-menerus terhadap proses negosiasi maupun dalam melakukan lobi dan diplomasi (Coban, 2016). Dewasa ini, China menjadi negara yang aktif dalam mempromosikan legitimasi klaim kedaulatan atas wilayah LCS melalui saluran-saluran media massa (Gracia, 2018). Di era kepemimpinan presiden Xi-Jinping, China tengah meningkatkan jangkauan media massa

sebagai bagian dari strategi diplomasi media massa guna menyebarkan pengaruhnya di LCS.



Sumber: Freedom House (Cook, 2020)

Gambar 1 *Toolbox* Pengaruh Global Media China

Propaganda, *content delivery* dan *censorship* merupakan bentuk strategi media massa China dalam menggelar ekspansi global sebagaimana yang saat ini diterapkan oleh Kantor Berita *Xinhua Group*, *China News Network Corporation* (CNC) dan *China Central Television* (CGTV) fokus terhadap setiap narasi pemberitaan sebagai *soft-power* diplomasi dalam mengukuhkan pengaruh global China (Cook, 2020). Dalam hal ini China telah menunjukkan pada dunia internasional, bahwa pengaruh media massa menghantarkan pada konstruksi sosial dalam menanamkan prinsip dasar dan nilai-nilai berikut simbol khusus yang dapat dijadikan sebagai asumsi dasar bagi dunia internasional terhadap pembenaran atas klaim kedaulatan China di LCS (AS, 2014).

Menyikapi fenomena tersebut, Indonesia dalam upaya mempertahankan hak berdaulat atas ZEE di wilayah LCS dirasa perlu untuk mengambil langkah tegas dalam memformulasikan kembali strategi diplomasi melalui peran dan fungsi media massa sebagai instrumen *second track* diplomasi. Meurujuk Diamond & McDonald, *Second-track diplomacy* diartikan sebagai bentuk pelibatan upaya dalam berdiplomasi dengan mengedepankan pada unsur lain maupun aktor berpengaruh lainnya di luar dari negara. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas diplomasi tidak lagi hanya sebatas *government-to-government* (G2G), namun juga berkembang yang melibatkan antara pemerintah atau negara bangsa, dengan perusahaan multinasional (MNCs) dan NGO. Fenomena

tersebut melahirkan pendekatan diplomasi baru yaitu *second-track diplomacy* dengan mengadopsi faktor-faktor multidimensional yang menunjang bagi pelaksanaan praktik diplomasi (Jones, 2021)

Media massa merupakan alternatif instrumen bagi negara dalam berdiplomasi, mendorong terbentuknya *common sense* dalam setiap *decision making* terhadap kebijakan politik luar negeri (Jones, 2021). Pendapat tersebut menjadi landasan ide dalam pemikiran penulis untuk melakukan penelitian jurnal berjudul "*Media Massa Sebagai Second Track Diplomasi Dalam Mendukung Kepentingan Nasional Indonesia Di Laut Cina Selatan*". Judul ini oleh penulis dianggap relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam praktik diplomasi Indonesia saat ini menghadapi propaganda media massa China dalam konflik LCS. Disamping itu, era keterbukaan informasi dan komunikasi media massa diharapkan membuka peluang bagi pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan upaya diplomasi yang bertujuan guna melindungi kepentingan nasional Indonesia terhadap keamanan dan kedaulatan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah LCS. Dengan ini, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sejauhmana dan bagaimana media massa dapat berperan sebagai instrumen *second track* diplomasi dalam proses penyelesaian secara damai terhadap konflik LCS.

Sebagai upaya memperkuat proses analisis, peneliti melakukan literatur review

terhadap beberapa jurnal terdahulu, diantaranya jurnal berjudul "*Peran Media Massa Dalam Politik Luar Negeri: Kasus Di Indonesia*" karya Asep Setiawan (2019). Jurnal ini menghasilkan strategi kebijakan tentang bagaimana media massa menghadirkan *framing* pemberitaan yang dikemas dalam *agenda setting* sesuai dengan fokus dunia internasional yang kemudian menjadi tujuan dari politik luar negeri (polugri) Indonesia. Adapun bagaimana proses media massa mengambil peran penting dalam pelaksanaan polugri tersebut menjadi masukan bagi penulis dalam memformulasikan tentang bagaimana media massa berperan sebagai instrumen *second track* diplomasi. Jurnal pendahulu lainnya berjudul *Beijing's Global Megaphone: The Expansion of Chinese Communist Party Media Influence since 2017* oleh Sarah Cook (2020). Jurnal ini membedah bagaimana media massa China berhasil melakukan perluasan pengaruh secara global yang selanjutnya memberikan gambaran serta asumsi publik internasional mengenai realita atas hegemoni China. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi penulis untuk menitikberatkan agenda setting media massa yang dapat mempengaruhi prespektif masyarakat internasional dalam menghadirkan solusi atas penyelesaian konflik LCS secara damai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisis berdasarkan

pendekatan analisis deskriptif (Moleong, 2010). Fenomena konflik LCS oleh peneliti merupakan fenomena sosial yang kemudian menjadi perlu untuk diteliti dengan menempatkan media massa sebagai sebagai variabel independen, dan kepentingan nasional Indonesia di LCS sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini adalah media massa yang dijadikan sebagai instrumen *second track* diplomasi oleh pemerintah Indonesia meraih kepentingan nasional di LCS. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yang terdiri dari tiga orang informan dengan latar belakang sebagai jurnalis senior di salah satu media massa swasta nasional, mantan kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), dan senior analis bidang diplomasi Kementerian Pertahanan RI. Sumber data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan ketiga informan tersebut, adapun data sekunder didapat dari hasil studi terdiri kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi, laporan penelitian, *website* dan portal pemberitaan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya (Mulyana, 2018).

Bedasarkan sumber data tersebut, maka data yang kemudian diolah peneliti merupakan data primen dan sekunder yang kemudian dianalisis melalui sejumlah tahapan seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti untuk melihat fenomena LCS melalui sudut pandang akademis (Mulyana, 2018). Data-data hasil analisis tersebut kemudian dikaji

menggunakan teori media massa khususnya yang menjelaskan tentang bagaimana media melakukan konsepsi terhadap *framing* pemberitaan, *agenda setting* serta penggunaan teori *second track* diplomasi dengan media massa sebagai instrumen negara dalam berdiplomasi. Berdasarkan tahapan penelitian menggunakan metode kualitatif tersebut, maka hasil penelitian ini memberikan gambaran detil dan penjelasan tentang bagaimana *second track* diplomasi melalui media massa dapat secara efektif dilakukan dengan menysasar pada capaian kepentingan nasional Indonesia di LCS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian pertama hasil dan pembahasan menyajikan intepretasi terhadap hasil analisis penelitian yang bersumber dari analisis terhadap data primer dan data sekunder. Hasil analisis tersebut mencapai pada sebuah usulan kebijakan tetang bagaimana media massa seharusnya dapat bertindak secara efektif menjalankan fungsi *second track* diplomasi pemerintah Indonesia. Melalui fungsi utama media massa sebagai saluran komunikasi massa, maka peningkatan terhadap eksposur pemberitaan penting untuk dilaukkan guna menggambarkan eksistensi pemerintah Indonesia dengan adanya pengelolaan potensi sumber daya maritim ZEE Indonesia di LCS. Pada bagian kedua, dianalisis data menghasilkan sebuah usulan strategi media massa yang menampakan konsepsi *agenda setting* dalam setiap tayangan pemberitaan mengenai konflik

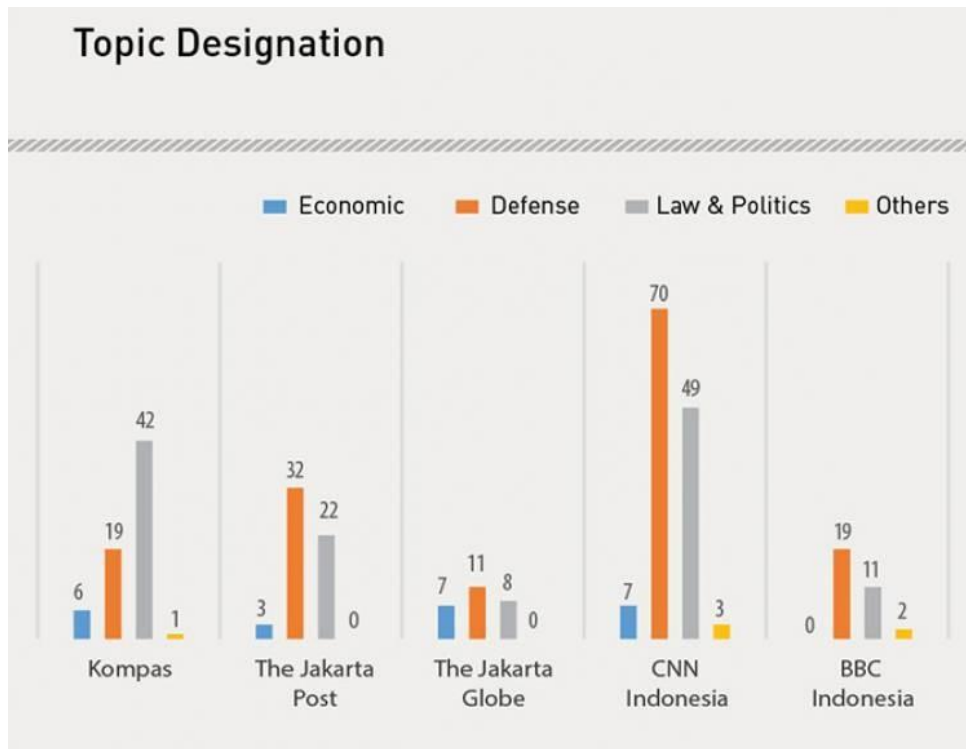
LCS. Upaya penyelesaian konflik LCS secara damai diunggulkan dalam setiap pemberitaan sebagai urgensi yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat internasional. Solusi konkret untuk dihadirkan oleh media massa sekaligus menjadi landasan berfikir masyarakat internasional terhadap upaya penyelesaian konflik secara damai adalah dengan mengimplementasikan pelaksanaan *freedom of navigation*.

Meningkatkan Eksposur Pemberitaan Terhadap Pengelolaan Potensi Maritim ZEE Indonesia di LCS

Pada dasarnya media massa adalah bentuk saluran komunikasi massa melalui publikasi terhadap informasi dengan kaidah jurnalistik. Dari fungsi media massa tersebut, maka dapat dipahami bahwa informasi didapat dari adanya eksposur pemberitaan (Amalia, 2020). Berdasarkan konsepsi tersebut maka, implementasi media massa sebagai *second track* diplomasi Indonesia adalah dengan meningkatkan eksposur pemberitaan terhadap aktivitas pengelolaan potensi maritim di ZEE Indonesia yang beririsan langsung dengan wilayah LCS yang diklaim oleh China. Upaya ini mendorong pemerintah Indonesia bersinergi dengan media massa terkait pemberitaan yang menyiarkan aktivitas

pengelolaan potensi sumber daya maritim di sepanjang ZEE Indonesia yang diklaim China masuk dalam wilayah LCS. Tujuan terhadap peningkatan eksposur pemberitaan oleh media massa untuk menampilkan pembangunan daerah wilayah sebagai usaha dalam mengoptimalkan potensi daerah setempat. Dimana hal tersebut berlaku untuk menegaskan aktivitas Indonesia terhadap hak berdaulat di ZEE Indonesia di wilayah LCS yang saat ini diubah nama oleh pemerintah Indonesia menjadi Laut Natuna Utara.

Dengan ini media massa memuat pesan penting terhadap kepentingan nasional yang fokus terhadap pembangunan industri daerah berkeunggulan kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan strategis ZEE Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberitaan terhadap pengelolaan potensi sumber daya maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan LCS masih sangat sedikit. Seiring dengan ketegangan yang terjadi di LCS, media massa nasional Indonesia turut berpartisipasi menjadikan tingginya topik pemberitaan *high politics* berupa isu-isu pertahanan sebagaimana grafik dibawah ini (Sugiarti, 2020).

Grafik 1 Top Topik Pemberitaan Media Massa

Sumber: *Strategic Review* (Wijaya, 2018)

Hasil survei yang dilakukan oleh *strategic review* di atas menunjukkan bahwa topik pemberitaan mengenai pertahanan masih mendominasi di lima media nasional yang memiliki jangkauan luas hingga internasional. Fakta tersebut menunjukkan bahwa topik *high politics* mendapat perhatian lebih dibandingkan *low politics*. Rendahnya persentase pemberitaan terkait isu di luar politik pertahanan mengakibatkan alternatif pemberitaan yang menyoroti program seperti pengelolaan potensi maritim ZEE Indonesia di LCS tidak mendapat perhatian (Wisnu, 2019). Topik pengelolaan potensi maritim sebagai alternatif informasi yang sengaja dihadirkan untuk menjawab kebutuhan terhadap perimbangan dalam sebaran informasi pemberitaan. Dalam hal ini jumlah kuantitas pemberitaan yang didukung dengan

komposisi pemberitaan berguna dalam mencapai ketepatan target sasaran informasi yang hendak dicapai untuk selanjutnya membentuk pemahaman publik (Sholihat, 2019).

Berita terhadap pengolahan potensi maritim ZEE Indonesia di LCS mencoba menghadirkan alternatif cara tentang bagaimana memanfaatkan keunggulan media massa itu sendiri untuk terlibat dalam pergeseran bentuk strategi diplomasi Indonesia. Dalam hal ini, tujuan utama kepentingan nasional pemerintah yang dipromosikan dalam pemberitaan di media massa adalah untuk penyediaan informasi yang terintegrasi mengenai sumber daya kelautan berikut pemanfaatannya potensi maritim di ZEE oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya narasi pemberitaan yang diangkat

berjalan secara konsisten dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah Natuna yang membenarkan asumsi tentang keberadaan Indonesia secara *de facto* berdasarkan UNCLOS (Septiawan, Peran Media Dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia (Analisis Framing Dalam Pemberitaan Lkbn Antara Terkait Sengketa Laut Cina Selatan), 2017).

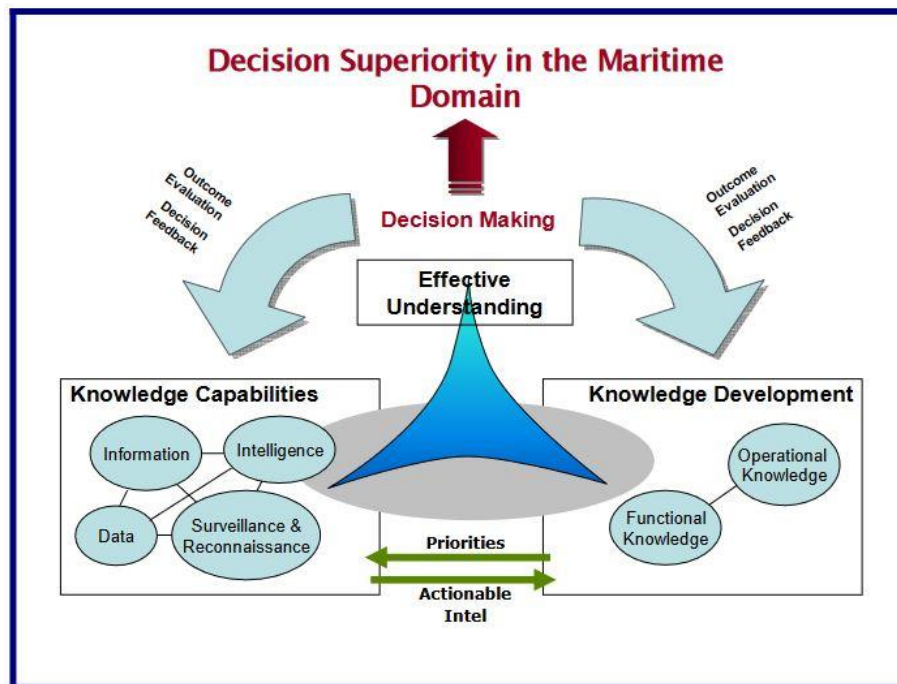
Asumsi yang hendak dibangun oleh media massa untuk melanggengkan kepentingan nasional Indonesia di LCS adalah dengan menumbuhkembangkan capaian optimal pemerintah di sektor perikanan dan pendapatan migas (Andika & Aisyah, 2017). Kebijakan pemerintah Jokowi dengan mengganti penyebutan LCS sebagai laut Natuna Utara merupakan bentuk *smart* diplomasi yang perlu mendapat eksposur besar-besaran dari media massa nasional dan yang juga memiliki jangkauan internasional. Pada tahapan yang lebih strategis, pendapatan migas dan non-migas berikut dengan industri perikanan hasil kebijakan pemerintah Indonesia perlu terus dikembangkan untuk kemudian layak dipublikasikan melalui media massa (Sulistiyani, Citra Pertiwi, & Sari, 2021). Mengandung pesan diplomatik kepada China, eksposur pemberitaan diharapkan berdampak maksimal sehingga mampu mengarahkan dan membentuk perilaku khalayak publik. Kemitraan strategis yang sudah terbentuk dengan insan media massa direalisasikan melalui program berita, iklan yang bersifat persuasif, kontek budaya lokal

masyarakat Natuna yang membawa misi khusus sebagai pesan diplomasi kepada China (Septiawan, 2017).

Dari hasil penelitian yang didapat melalui wawancara mendalam dengan ketiga informan tersebut, secara keseluruhan mendukung adanya peningkatan eksposur pemberitaan terhadap pelaksanaan program pemerintah tersebut. Tingginya isu terkait *high politics* membutuhkan pemberitaan terkait pengelolaan potensi sumber daya maritim sebagai alternatif informasi yang dapat menciptakan keseimbangan informasi di media massa (Septiawan, 2022). Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Pamela dan Reese dalam teori *hierarchy of influence* yang membutuhkan perpaduan dari lima faktor pendukung yaitu 1) pengaruh individual atau pekerja media, 2) pengaruh rutinitas media, 3) pengaruh organisasional, 4) pengaruh dari luar organisasi, dan 5) pengaruh ideologi (Perloff, 2014). Dengan orientasi berita yang mengacu pada *framing* pengelolaan potensi maritim di ZEE Indonesia, maka langkah pertama adalah dengan memberikan pemahaman terhadap literasi tentang kemaritiman kepada jurnalis atau internal dari media massa itu sendiri. Kedua mengenai pengaruh rutinitas media adalah dengan bertindak aktif guna menyoroti kegiatan forum-forum diskusi ilmiah yang membahas tentang kemaritiman sebagai bentuk sumbangsih media massa dalam proses edukasi. Ketiga terkait pengaruh organisasional adalah dengan menjalin relasi media dengan memanfaatkan sarana iklan,

advertorial, maupun rilis secara berkala yang bernilai kerja sama antara media massa dengan institusi terkait. Keempat adalah dengan menjadikan media massa sebagai pendukung

kebijakan guna menanamkan kepedulian terhadap domain maritim bagi masyarakat secara keseluruhan (Agastia & Perwita, 2017).



Sumber: (Executive Office of The President of the United States, 2012)

Gambar 2 Domain Kebijakan Maritim

Dalam mengedepankan informasi terakait pengelolaan potensi maritim di ZEE Indonesia wilayah LCS, maka sebagaimana yang ditampilkan pada gambar di atas, *hierarchy of influence* mendorong media massa bertanggungjawab terhadap materi pemberitaan yang menampilkan unsur *knowledge capabilities* dan *knowledge development*. Kedua unsur tahapan pengetahuan tersebut ditentukan berdasarkan proses *decision making* yang didukung dengan adanya peningkatan eksposur pemberitaan terhadap pengelolaan potensi maritim. Narasi pemberitaan yang diangkat berjalan secara konsisten dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah Natuna yang

membenarkan asumsi tentang keberadaan Indonesia secara *de facto* berdasarkan UNCLOS. Dengan demikian *second track* diplomasi yang sejatinya adalah upaya pemerintah terhadap China merupakan bagian dari peran media sebagai “*shaper*” yakni pembentuk asumsi pembenaran terhadap narasi maupun konten dalam sebuah pemberitaan. Dengan kata lain, *second track* diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mempengaruhi sudut pandang kebijakan politik luar negeri China sebagai bentuk capaian terhadap kepentingan nasional Indonesia di LCS (Kusumah, Supriatna, & Kusmarni, 2018).

Perlu digarisbawahi, peristiwa tersebut sebagai dampak luas media massa yang dinilai efektif dalam menjalankan komunikasi massal. Pemberitaan yang efektif berdampak politis oleh kekuatan politik tertentu yang dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam melakukan manipulasi opini publik. Peningkatan eksposur pemberitaan kemudian memuat berbagai informasi yang disiarkan guna menciptakan efek positif dalam penggambaran *image* yang ingin dideskripsikan dalam setiap narasi pemberitaan yang diterbitkan oleh media massa (Rakhmat, 2022). Kepentingan nasional Indonesia dalam hal ini menjelma layaknya ideologi politik yang berpengaruh besar terhadap penentuan setiap konten ataupun berita di media massa dalam bentuk, surat kabar, portal berita, website, program berita TV (Sukmi, 2015).

Dengan demikian, maka informasi pengelolaan potensi maritim yang merupakan modal utama dari *second track* diplomasi Indonesia menggambarkan upaya nyata pemerintah Indonesia yang dalam Holmes (2011) sebagai *spread of influence* yang bertendensi memiliki kepentingan ekonomi dan politik. *Spread of influence* melalui peningkatan eksposur pemberitaan telah menampilkan “wajah” komunikasi media massa yang diaktualisasikan secara makro dengan menarik kesimpulan umum terkait kepentingan nasional Indonesia di LCS. Penggunaan media massa sebagai *second track* diplomasi menempatkan keterhubungan

komunikasi media massa kepada tingkat yang lebih paripurna yaitu negara.

Agenda-Setting Dukungan Masyarakat Internasional Terhadap Implementasi Freedom of Navigation di LCS

Media massa sebagai *second track* diplomasi selanjutnya menekankan pada peran media massa dalam melaksanakan *agenda setting* guna mengamankan kepentingan nasional Indonesia di LCS. Tantangan serta ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas militer China di LCS, mendorong pemerintah Indonesia untuk menggarisbawahi pentingnya terhadap upaya menjaga stabilitas keamanan kawasan dengan mengedepankan diplomasi guna mengakhiri konflik. *Second track* diplomasi oleh pemerintah Indonesia melalui upaya *agenda setting* bertujuan menciptakan *public awareness* (kesadaran masyarakat) dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk diangkat, dibahas, menjadi opini publik untuk dipercaya guna berbuah menjadi asumsi dasar pemikiran terhadap penciptaan realitas yang dikehendaki (Rizky, 2017).

Pada tataran operasional, Bernard C. Cohen memahami bahwa komunikasi media massa cenderung mengarah kepada *agenda setting* ketika pihak yang berkepentingan akan memilih untuk menentukan topik tertentu, mengumpulkan isu-isu potensial terkait, dan memperhatikan nilai khusus terhadap sebuah pemberitaan yang dapat mempengaruhi opini publik (Amalia, 2020). Penyesuaian terhadap

topik pemberitaan yang dipilih tentunya akan dipengaruhi besar oleh kepentingan nasional Indonesia di LCS khususnya di beberapa bidang antara lain bidang pertahanan, pembangunan ekonomi kawasan dan stabilitas keamanan di jalur pelayaran internasional. Adapun bidang pertahanan yang mengutamakan keutuhan dan kedaulatan wilayah, ekonomi terkait pemanfaatan potensi maritim di ZEE, serta stabilitas keamanan LCS sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional dapat terwujud ketika implementasi terhadap *freedom of navigation* atau kebebasan dalam bernavigasi di LCS dapat terselenggara secara utuh (Sulistiyani, Pertiwi, & Sari, 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka *agenda setting* diwujudkan dengan menghadirkan narasi-narasi pemberitaan yang mengarah pada urgensi terhadap implementasi *freedom of navigation* sebagai kepentingan bersama negara-negara di kawasan.

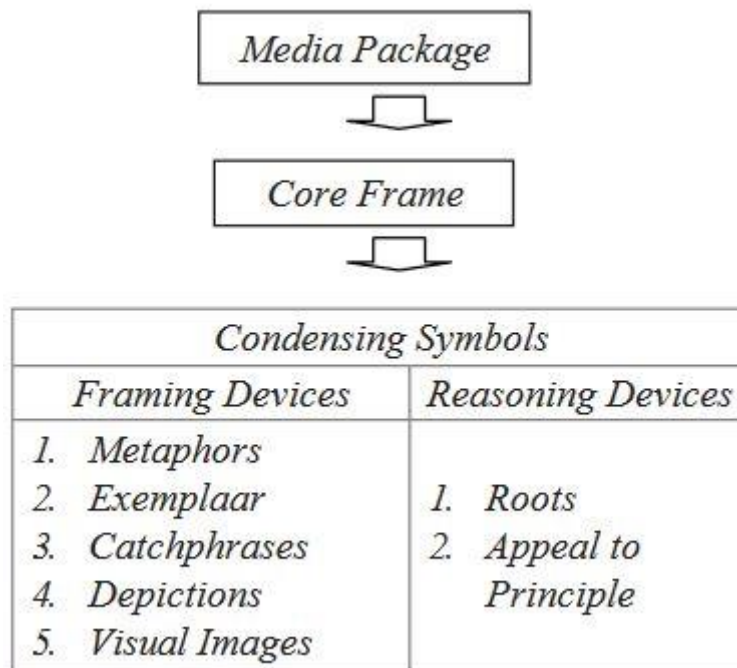
Agenda setting terhadap upaya perwujudan implementasi *freedom of navigation* jika mengacu pada pemahaman Bernard C. Cohen tersebut, maka media massa dalam hal ini berlaku sebagai pusat penentu terhadap sebuah kebenaran yang dipahami oleh publik maupun masyarakat internasional. *Framing* terhadap narasi pemberitaan konflik LCS ditujukan untuk menjangkau kesadaran publik mengenai implementasi *freedom of navigation* sebagai solusi sesuai ketentuan yang berlaku dalam UNCLOS 1982 guna mengakhiri ketegangan di LCS. Dengan ini

konsep *agenda setting* difokuskan guna mengakomodir transformasi konflik menuju tata kelola keamanan kawasan khususnya terhadap wilayah LCS (Pudjiastuti & Prayoga, 2015). Berdasarkan upaya tersebut, *second track* diplomasi diupayakan dengan meraih keutamaan media massa dalam mentransfer sebuah gagasan *freedom of navigation* untuk kemudian dipahami oleh masyarakat internasional sebagai sebuah kebenaran. Sejalan dengan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, maka implementasi *freedom of navigation* mencerminkan keutamaan media massa sebagai *second track* diplomasi tentang bagaimana membuat apa yang menjadi kepentingan nasional bagi Indonesia, juga menjadi hal penting bagi seluruh negara yang berkepentingan atas klaim kedaulatan di LCS (Bensa & Wijaya, 2017).

Media massa aktif dalam memberitakan berbagai bentuk forum diskusi, dialog, konferensi, dan berbagai forum akademis lainnya untuk diolah menjadi sebuah berita dengan *framing* yang diarahkan untuk memunculkan dukungan masyarakat internasional terhadap implementasi *freedom of navigation* di LCS. *Second track* diplomasi pada tahap ini dicapai berdasarkan hubungan kuat antara narasi pemberitaan yang mampu menghadirkan penekanan terhadap sebuah isu-isu yang dinilai penting oleh khalayak. Jennings Bryant dan Susan Thompson pada konteks ini berargumen bahwa media massa untuk tujuan diplomasi adalah salah satunya dengan menjadikan *agenda setting* tersebut

sebagai simbol dengan menampilkan kekuatan suatu negara terhadap lawan politiknya (Santosa, 2017). Mengutip skema analisis *framing* yang dikemukakan oleh Gamson dan Modigliani dalam (Sobur, 2002) bahwa

agenda setting merupakan representasi dari media massa berupa berita dan artikel, terdiri atas interpretasi terhadap makna tertentu yang dibangun berdasarkan kepentingan yang hendak dicapai.



Sumber: (Kurniasari & Aji, 2015)

Gambar 3 Skema Analisis *Framing* Model Gamson dan Modigliani

Mengingat Indonesia bukanlah lawan politik yang sebanding dengan kekuatan China, maka tujuan *agenda setting* yang dibangun melalui model analisis *framing* model Gamson dan Modigliani berupaya melihat komposisi representasi media berupa berita dan artikel yang mengandung konstruksi terhadap makna tertentu (Kurniasari & Aji, 2015). *Agenda setting* menghadirkan *media package* guna menjadikan implementasi *freedom of navigation* di LCS sebagai *core frame*. *Core frame* baru akan diterima sebagai *commen sanse* ketika usulan kebijakan *freedom of navigation* di LCS, didorong dengan *condensing symbol*, dimana hal

tersebut digambarkan dengan berbagai bentuk aktivitas seperti, forum internasional, diskusi lintas lembaga, simposium, laporan penelitian akademis yang secara keseluruhan dikemas sebagai indikator dalam pesan yang disampaikan melalui pemberitaan di media massa.

Framing terhadap *freedom of navigation* sebagai solusi atas konflik LCS dimunculkan dalam setiap *agenda setting* yang kemudian berguna sebagai komunikator dalam menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. Adapun struktur *framing devices* yang mencakup *metaphors*, *exemplaar*, *catchphrases*, *depictions*, dan *visual images*

menekankan aspek bagaimana memahami rekonstruksi terhadap isu seputar LCS. Tingginya topik *high politics* terhadap pemberitaan LCS, tidak seutuhnya diperlihatkan sebagai sebuah kebenaran, disinilah *agenda setting* berguna untuk mengemas informasi terkait apa yang perlu untuk menjadi penekanan, dan apa yang tidak

untuk dimunculkan. Informasi yang tersebut bertujuan untuk menarik fokus perhatian dunia internasional, disaat negara-negara yang berkepentingan terhadap LCS berupaya menghadirkan konsep pemikiran terkait jalan keluar yang harus diambil dan bagaimana mengolah implementasi *freedom of navigation* diterima secara konsensus (Ritonga, 2018).

Tabel 1 Struktur Pemberitaan Terhadap *Agenda Setting Freedom of Navigation*

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Literasi
Struktur Sintaksis	Judul	<i>Freedom of Navigation</i> solusi konkret atas penyelesaian konflik klaim kedaulatan di LCS
	Lead	NGo, LSM, Akademisi, Diplomat, media dan korporasi internasional dukung kesamaan hak katas kebebasan dalam bernavigasi di LCS.
	Latar Informasi	Adanya kesepakatan CoC di antara negara-negara ASEAN
	Kutipan Sumber	Pakar keselamatan pelayaran Pakar lingkungan hidup (Pelestarian Biota Laut) Pakar ekonomi dan ivestasi Pakar hukum laut internasional Pakar <i>humanity (anti-war movement)</i>
	Pernyataan / Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Rezim internasional, masyarakat Internasional mendukung proses perdamaian konflik sengketa LCS. • Dalam proses diskusi mengenai perdamaian terhadap sengketa LCS harus ditinjau dari berbagai aspek berupa aktivitas ekonomi, pelayaran, <i>humanity</i>, kelestarian lingkungan hidup, potensi kerjasama ekonomi. • Pendudukan melalui kekuatan militer terhadap wilayah LCS
	Penutup	Kalimat pernyataan progresif tentang upaya keduabelah pihak baik pemerintah China maupun masyarakat internasional guna mengambil solusi alternatif terhadap penyelesaian damai terkait sengketa LCS serta penetapan batas teritorial terhadap wilayah di LCS.

Sumber: Diolah Peneliti

Karakteristik *agenda setting* yang tepat untuk kemudian mencapai hasil maksimal dalam model *second track* diplomasi adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Dearing dan Rogers dikutip dari (Santosa,

2017) bahwa dalam tataran yang lebih kompleks terkait dengan agenda kebijakan global, maka diskursus terhadap pemberlakuan *freedom of navigation* didukung dengan *framing* pemberitaan media massa

mebutuhkan apa yang disebut sebagai alterasi konten. Dalam hal ini konten-konten ataupun narasi pemberitaan yang didukung dengan, atau yang menggambarkan sebuah tindakan politis dari masyarakat internasional dalam menyuarkan stabilitas keamanan kawasan Asia-Pasifik dari ancaman agresifitas militer China di LCS (Muhamad, 2021). Dalam pemenuhan terhadap agenda kebijakan tersebut, maka *framing* yang diangkat oleh media massa mengarah pada cakupan isu pemberitaan hasil dari *agenda setting* terhadap masing-masing kepentingan nasional dari elit politik yang mendukung diskursus *freedom of navigation*.

Intensitas pemberitaan yang begitu masif dan mengarah pada satu tujuan politik tertentu, berupaya menciptakan peluang baru bagi ruang keterbukaan dalam menyuarkan *freedom of navigation* sebagai diskursus hasil konsensus yang disepakati oleh kelompok kepentingan dengan mengatasnamakan masyarakat internasional. Keadaan tersebut kembali pada argumentasi James W. Carey bahwa sesungguhnya pemberitaan tidak selamanya merefleksikan realitas, namun kepentinganlah yang mendasari lahirnya konstruksi terhadap realitas tersebut (Asri, 2017). Keterbukaan ide dan gagasan yang lahir sebagai bentuk diplomasi melalui media massa tersebut pada akhirnya mencoba mengimbangi atau sebagai materi strategi guna melakukan konter opini terhadap propaganda media China yang jauh lebih dahulu melakukan publikasi terhadap peta *nine-dash line* sebagai justifikasi

pembenaran klaim mereka atas wilayah LCS (Muslim, 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media massa sebagai *second track* diplomasi dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia di LCS, menggambarkan perkembangan ruang lingkup diplomasi berikut dengan peran media massa yang semakin dinamis. Media massa dalam hal ini menjadi aktor dalam politik internasional dikarenakan sifat, fungsi dan peranannya yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan maupun *decision making* suatu negara. Dengan ini, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini secara utuh menjawab tujuan penelitian untuk mengetahui sejauhmana dan bagaimana media massa berfungsi sebagai instrumen *second track* diplomasi dalam proses penyelesaian konflik secara damai.

Mengenai sejauhmana media massa dianggap efektif sebagai instrumen *second track* diplomasi dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penekanan fungsi media sebagai *shaper*. Dalam hal ini media massa melakukan meningkatnya eksposur pemberitaan terkait fokus pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan potensi maritim wilayah ZEE. Pada pelaksanaannya, dibutuhkan sinergitas erat antara pemerintah dengan pihak media massa terutama dalam hal pemberitaan terhadap isu-isu strategis terkait kepentingan nasional Indonesia di LCS. Upaya

untuk meningkatkan eksposur pemberitaan menjadi langkah cerdas pemerintah melalui media massa guna menampilkan eksistensi Indonesia secara *de-facto* maupun *de-jure* yang ditunjukkan dengan kehadiran pemerintah Indonesia melalui pengelolaan kawasan perbatasan maritim dengan menggali potensi sumber daya maritim terhadap wilayah ZEE Indonesia di LCS.

Poin kedua kesimpulan hasil analisis pembahasan yaitu terkait diperlukannya *agenda-setting* terhadap dukungan masyarakat internasional mengenai implementasi *freedom of navigation* di LCS. Menyadari potensi ancaman dan tantangan wilayah ZEE Indonesia dibawah bayang-bayang agresifitas militer China di LCS, maka media massa diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai diskursus *freedom of navigation* sebagai bentuk dari sebuah konsensus masyarakat internasional yang menghendaki stabilitas keamanan di kawasan. Melalui upaya *agenda setting*, media massa dalam “pertarungan” diplomasi berupaya menyajikan informasi yang didalamnya terkandung nilai khusus terhadap sebuah pemberitaan yang dapat mempengaruhi opini publik. Dengan demikian, *agenda setting* tersebut memberikan gambaran terhadap *framing* pemberitaan yang mengarah pada dukungan masyarakat internasional atas pemberlakuan *freedom of navigation* sebagai langkah damai terhadap penyelesaian konflik LCS. .

Daftar Pustaka

- Agastia, I. G., & Perwita, A. B. (2017). Building Maritime Domain Awareness as an Essential Element of the Global Maritime Fulcrum: Challenges and Prospects for Indonesia’s Maritime Security. *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6 Edisi 1 /Aprl - September (2017)*, 113-122.
- Amalia, A. C. (2020, April 13). *Teori Agenda Setting dan Framing dalam Media Relation*. Retrieved Februari 28, 2022, from Binus University: <https://binus.ac.id/malang/2020/04/teori-agenda-setting-dan-framing-dalam-media-relations/>
- Andika, M. T., & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Indonesia Perspective, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2017)*, 161-179. <https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18477>
- Andrianti, N. (2015). Peran Media Massa Nasional Dalam Politik Internasional. *INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015*, 43-56. <https://doi.org/10.21831/informasi.v45i1.7769>
- AS, A. B. (2014). Periode Perkembangan Media Massa. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 18 No. 1 (Januari - Juni 2014)*, 119 - 132. <https://doi.org/10.31445/jskm.2014.180107>
- Asri, R. (2017). Hubungan Media Massa Dan Khalayak Reinterpretasi di Era Milenial. In R. Arindita, A. Mandjusri, & R. Asri, *Media Dan Masyarakat Kini Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Peran Media Baru Dalam Perubahan Gaya Hidup* (pp. 133-199). Jakarta: UAI Press.
- Bensa, C. P., & Wijaya, L. (2017). Media Propaganda Techniques in the South China Sea Dispute. *Jurnal Komunikasi ISKI, (Vol. 02. 01)* , 1-5. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v2i1.93>
- Coban, F. (2016). The Role of the Media in International Relations; From the CNN

- Effect to the AllJazeera Effect. *Journal of International Relations and Foreign Policy* (Vol. 4, No. 2, Desember 2016), 55-77. <https://doi.org/10.15640/jirfp.v4n2a3>
- Cook, S. (2020). *Beijing's Global Megaphone: The Expansion of Chinese Communist Party Media Influence since 2017*. Washington, DC: FreedomHouse.org.
- Executive Office of The President of the United States. (2012). *National Plan To Achieve Maritime Domain Awareness For The National Strategy For Maritime Security*. Washington, DC: CreateSpace Independent Publishing.
- Gracia, E. (2018). Kontrol Media Tiongkok di Era Xi Jinping sebagai Upaya Tiongkok menjadi Kekuatan Global. *Jurnal KSM-PMI: (The Rise of Middle Power Vol. 2 No. 2. 2018)*, 31-41. <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4149.31-41>
- Jones, P. (2021). Best Practices in Track Two Diplomacy In: International Negotiation. *Journal of International Negotiation* 26 (2021) , 1-4. <https://doi.org/10.1163/15718069-25131256>
- Kurniasari, N., & Aji, G. G. (2015). Kepemilikan dan Bingkai Media (Analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo Sebagai Kandidat Calon Presiden pada Koran SINDO). *Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 6 No. 1, Februari-Juli (2015)*, 96-116. <https://doi.org/10.30659/jikm.6.1.96-116>
- Kusumah, R. W., Supriatna, N., & Kusmarni, Y. (2018). Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan. *Jurnal ACTUM Volume 7, NO.2, Oktober (2018)*, 255-268. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15610>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, S. V. (2021). Isu Laut China Selatan: Ekspansi China dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi. *Info-Singkat Vol. XIII, No. 5/I/Puslit/Maret/(2021)*, 7-15.
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim. (2013). Konstruksi Media Tentang Serangan Israel Terhadap Libanon (Analisis Framing terhadap Berita tentang Peperangan antara Israel dan Libanon dalam Surat Kabar Kompas dan Republika). *Jurnal Studi Komunikasi I Dan Media Vol. 17 No. 1 (Januari – Juni 2013)*, 75-92. <https://doi.org/10.31445/jskm.2013.170104>
- Perloff, R. M. (2014). *The dynamics of the political communication: Media and Politic in the Digital Age*. New York: Routledge.
- Pudjiastuti, r. N., & Prayoga, P. (2015). ASEAN Dan Isu Laut Cina Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional . *Jurnal Penelitian Politik. Volume 12 No. 1 Juni (2015)*, 99–115.
- Rakhmat, M. Z. (2022, Januari 20). *Three Ways China is Growing its Media Influence in Indonesia*. Retrieved Maret 28, 2022, from IndraStra Global: <https://www.indrastra.com/2022/01/Chinese-Media-Influence-in-Indonesia.html>
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *SIMBOLIKA, Vol. 4 (1) April (2018)*, 32-41. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>
- Rizky, T. (2017). Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Tahun 2012 - 2015. *Jom FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017* , 1-16.
- Santosa, B. A. (2017). Peran Media Massa Dalam Mencegah Konflik. *Jurnal ASPIKOM, (Volume 3 Nomor 2, Januari 2017)*, 199-214.
- Septiawan. (2017). *Peran Media Dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia (Analisis Framing Dalam Pemberitaan Lkbn Antara Terkait Sengketa Laut Cina Selatan)*. Jakarta: Unhan Press.

- Septiawan. (2022, 31 Maret). Memahami Pergerakan Ekspos Media Massa Terhadap Konflik Laut China Selatan. (S. Iriawan, Interviewer)
- Setiawan, A. (2019). Peran Media Massa Dalam Politik Luar Negeri: Kasus di Indonesia. *Mandala Jurnal Hubungan Internasional Vol.2 No 1 Januari-Juni (2019)*, 45-63. <https://doi.org/10.33822/mjih.v2i1.994>
- Setiawan, A. (2020, Februari 8). *Media Online Perlu Berbenah Diri*. Retrieved from Pusat Informasi Dewan Pers: https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/173/Media_Online_Perlu_Berbenah_Diri
- Sholihat, F. (2019). Mass Communication. *Jurnal Komunikasi Massa Administrasi Bisnis: Politeknik Negeri Bandung*, 18-29.
- Sobur, A. (2002). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiarti, P. I. (2020). *Pengaruh Konstruksi Berita Media Online Xinhua Terhadap Eskalasi Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2016-2017*. Surabaya : Fisip UIN Sunan Ampel .
- Sukmi, S. N. (2015). Rethinking Teori Komunikasi Dalam Konteks Media Baru (Telaah Pemikiran Holmes Tentang Komunikasi, Teknologi Dan Masyarakat). *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial (4 (1) | vol: | issue: | 2015)*, 1-23.
- Sulistiyani, Y. A., Citra Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo. *Politica (Vol. 12 No. 1 Mei 2021)*, 84-101. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>
- Wijaya, L. (2018, Januari 1). *Indonesia's media and South China Sea: The country's media is shifting its coverage of this intractable dispute. It's not good news for Beijing*. Retrieved Februari 10, 2022, from School of Government and Public Policy Indonesia: <http://sr.sgpp.ac.id/post/indonesias-media-and-south-china-sea>
- Wisnu, D. (2019). *Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad ke-21*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.